ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan adat masyarakat Tionghoa di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, pewarisan umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana anak laki-laki memiliki hak utama atas warisan, sedangkan anak perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak memperoleh warisan sama sekali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh hukum positif di Indonesia, terjadi pergeseran dalam praktik pewarisan tersebut. Adanya perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa di Kabupaten Melawi mendorong penulis untuk mendalami atau mengkaji bagaimana pewarisan yang terjadi dalam pada masyarakat keturunan Tionghoa khususnya dalam hal adanya perbedaan kedudukan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat masyarakat Tionghoa di Kabupaten Melawi, dan Faktor apa yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris pada masyarakat Tionghoa di Kabupaten Melawi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis untuk menganalisis bagaimana kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Tionghoa di Kabupaten Melawi. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, ahli hukum, serta masyarakat setempat, serta ditunjang dengan studi literatur terhadap regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris adat Tionghoa Di Kabupaten Melawi masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, sehingga anak laki-laki merupakan pewaris utama dalam melanjutkan garis keturunan keluarga serta meneruskan usaha keluarga. Sedangkan kedudukan anak perempuan tidak memiliki hak waris karena dianggap bukan penerus garis keturunan dan statusnya berpindah ke keluarga suami setelah menikah. Selain itu, masyarakat menganggap kedudukan anak perempuan dalam keluarga bersifat sementara dan lebih rendah dibanding anak laki-laki. Namun, dalam beberapa kasus, jika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan dapat menerima warisan sebagai pengecualian.

Pembaruan sistem pewarisan adat yang lebih adil bagi anak perempuan semakin diperlukan seiring meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Pemerintah diharapkan berperan dalam memfasilitasi diskusi antara tokoh adat dan masyarakat untuk menyeimbangkan nilai adat dengan prinsip keadilan. Keluarga Tionghoa perlu mempertimbangkan hukum modern guna menghindari ketimpangan dalam hak waris, terutama bagi perempuan yang sudah menikah atau tidak memiliki saudara laki-laki. Diperlukan dorongan progresif dalam perubahan sosial dan kultural agar hak waris perempuan tidak terpinggirkan, sehingga tercapai keseimbangan antara adat dan keadilan.

Kata Kunci: *Pewarisan Adat, Perempuan, Masyarakat Tionghoa, Hukum Waris*

ABSTRACT

This research discusses the position of women in the traditional inheritance system of the Chinese community in Melawi Regency, West Kalimantan. In the Chinese tradition, inheritance generally follows a patrilineal system, where sons have the main rights to inheritance, while daughters often get a smaller share or even no inheritance at all. However, along with the times and the influence of positive law in Indonesia, there has been a shift in the practice of inheritance. The difference in position between boys and girls in the inheritance of Chinese descendants in Melawi Regency encourages the author to explore or study how inheritance occurs in Chinese descendants, especially in terms of differences in position between male and female heirs.

The problems discussed in this study are the position of daughters in the customary inheritance of Chinese society in Melawi Regency, and what factors cause daughters not to become heirs in Chinese society in Melawi Regency.This research uses an empirical juridical approach with a sociological approach to analyze how the position of women in the inheritance of Chinese customs in Melawi Regency. Data is obtained through interviews with traditional leaders, legal experts, and the local community, and supported by literature studies of applicable regulations.

The results showed that the position of daughters in the distribution of Chinese customary inheritance in Melawi Regency is still strongly influenced by the patrilineal kinship system, so that sons are the main heirs in continuing the family lineage and continuing the family business. Meanwhile, the position of daughters does not have inheritance rights because they are considered not the successor to the bloodline and their status moves to the husband's family after marriage. In addition, the community considers the position of girls in the family to be temporary and inferior to that of boys. However, in some cases, if the family has no sons, girls can receive inheritance as an exception.

There is an increasing need to reform the customary inheritance system to make it fairer for girls as awareness of gender equality increases. The government is expected to play a role in facilitating discussions between traditional leaders and the community to balance traditional values with principles of justice. Chinese families need to consider modern laws to avoid inequality in inheritance rights, especially for women who are married or have no brothers. A progressive push for social and cultural change is needed so that women's inheritance rights are not marginalized, thus achieving a balance between custom and justice.

Keywords: *Customary Inheritance, Women, Chinese Community, Law of Inheritance*